

# **KOPERASI DAN KORPORASI PETANI: KUNCI PEMBUKA PENGEMBANGAN AGRIBISNIS BERDAYA SAING, BERKERAKYATAN, DAN BERKEADILAN**

Rudi Wibowo<sup>1</sup>

## **PENDAHULUAN**

Dalam era transisi demokratisasi saat ini, secara nasional tampak ada keinginan sangat kuat untuk mengangkat derajat kesejahteraan petani yang selama ini merupakan bagian terbesar masyarakat yang “tertinggal” dalam pembangunan. Tekad tersebut paling tidak terlihat dari *jargon-jargon* umum para calon pemimpin negara masa depan dalam kampanye pemilihan presiden di bulan Juni 2004 ini. Jika benar bahwa jargon-jargon tersebut akan menjadi landasan kebijakan pemerintahan masa depan ini, maka hal itu berarti akan menempatkan pembangunan nasional dalam *mainstream* pembangunan pertanian, dengan petani sebagai subyek utamanya. Hal ini mengingat besarnya potensi sumberdaya (*resource endowment*) dan besarnya masyarakat Indonesia yang bergantung pada bidang pertanian dalam arti luas. Ke depan, pertanian berwawasan agribisnis mestinya diletakkan pada posisi sentral di dalam pembangunan ekonomi, pertanian dan perdesaan. Menggarisbawahi hal itu, para ekonom pertanian pun pada akhir bulan Mei 2004 yang lalu telah mengingatkan para calon pemimpin nasional dalam konklusi konperensi nasionalnya dengan bagian rumusan terpentingnya sebagai berikut.

*Rekonstruksi dan restrukturisasi pertanian Indonesia akan sangat tergantung pada bagaimana pemimpin bangsa mendudukan pertanian dalam kerangka pembangunan nasional. Harus ada pandangan normatif pemimpin bangsa yang berani mengambil posisi yang jelas dengan sikap: “ .....apabila terdapat berbagai kepentingan pembangunan, dan kepentingan yang lain bertentangan dengan keperluan pembangunan pertanian, maka kepentingan yang lain itu harus ditunda.....”.*<sup>2</sup>

Peringatan dari para ekonom pertanian tersebut menjadi amat sangat penting bagi keseluruhan bangsa ini,--terutama bagi para pemimpin pengelola negara mendatang-- untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Mengapa demikian? Indonesia sebagaimana negara-negara agraris berkembang lain, bagian terbesar potensinya adalah sumberdaya pertanian dengan bahagian terbesar penduduknya para petani, akan tetapi sejauh ini justru belum menunjukkan peningkatan kehidupan dan kesejahteraan mereka. Banyak bukti menunjukkan kecenderungan itu. Secara makro misalnya, ketidak-serasian karena tajamnya penurunan *Gross Domestic Product* pertanian (dari sekitar 80% GDP nasional di tahun

---

<sup>1</sup> Sekjen PERHEPI 2004-2007 dan Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Jember.

<sup>2</sup> Dicuplik dari Rumusan Konperensi Nasional PERHEPI ke XIV di Jakarta, 28-29 Mei 2004.

1950-an menjadi hanya 17% di awal milenium ini) dibanding lambatnya penurunan *share* ketenagakerjaannya (dari sekitar 90% di tahun 1950-an menjadi 46% di awal milenium ini) menunjukkan betapa rendahnya produktivitas kerja di bidang pertanian ini, dibanding sektor industri yang meningkat pesat produktivitasnya. Globalisasi tampaknya juga tidak berpihak pada pertanian, dengan terjadinya kecenderungan konsisten penurunan harga-harga riil produk primer pertanian<sup>3</sup>. Konsistensi penurunan harga-harga produk primer pertanian tersebut secara agregat tentu akan menyulitkan posisi petani dan pertanian masa depan. Petani, sebagai *the real investors* seringkali tidak menjadi perhatian dan bahkan diabaikan oleh pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan tampaknya masih *friendly* dengan para pengusaha besar dan sektor di luar pertanian. Misalnya, tahun 2003 lalu Bank Indonesia mencatat bahwa jumlah kredit investasi sektor pertanian Rp 10,3 triliun dari total Rp 54,6 triliun atau sekitar 18,8 persen, sedangkan kredit modal kerja sektor pertanian hanya Rp 10,3 triliun dari total Rp 157,6 triliun atau sekitar 6,53 persen. Sektor pertanian tidak hanya memerlukan tingkat suku bunga yang tepat, tetapi juga akses dan kemudahan lain yang dapat dimengerti oleh pelaku sektor pertanian<sup>4</sup>. Dalam pada itu, secara mikro-wilayah banyak implementasi pembangunan pertanian yang masih menjadi keprihatinan, misalnya semakin terbatasnya penguasaan dan skala usaha akibat konversi terus-menerus lahan produktif pertanian ke bukan-pertanian, teknologi yang relatif stagnan dan “miskin” terobosan baru, serta kecenderungan keterpisahan (*decoupling*) pertanian antar-skala dan antar-wilayah, baik horisontal maupun vertikal.

Mencermati keadaan di atas, tulisan sederhana ini ingin mengajukan pemikiran atau konsepsi dasar bagi pembangunan pertanian masa depan, terutama dikaitkan dengan upaya kelembagaan (*institutional building*). Upaya kelembagaan tersebut menjadi sangat penting, terutama dalam rangka mengakselerasi modal sosial bagi kebutuhan pembangunan ekonomi pertanian yang berdaya saing, lebih demokratis, berkerakyatan, sehingga diharapkan lebih mensejahterakan petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Mudah-mudahan, pengelola negara masa depan pasca pemilu 2004 ini mengkontemplasikannya menjadi landasan kebijakan pembangunan ekonomi nasional mendatang, dan merealisasikannya di lapangan.

## **AGRIBISNIS SEBAGAI A NEW PARADIGM**

Mendalami potret pembangunan pertanian berwawasan agribisnis saat ini, secara nasional masih sungguh-sungguh memprihatinkan. Agribisnis yang sejak tahun 80-an secara nasional telah diposisikan sebagai *a new way to look agriculture, a new agriculture paradigm*, ternyata pada tingkatan konsepsional saja masih banyak menyimpan berbagai

---

<sup>3</sup> Periksa Agus Pakpahan, 2004. Petani Menggugat, Bab VII, halaman 123-132. Diterbitkan oleh Max Havelaar Indonesia dan GAPPERINDO. Mengambil data *World Bank*, dengan nilai indeks tahun 1990=100, jika pada tahun 1960 indeks harga dunia produk pertanian agregat 208, maka pada awal milenium ini menurun drastis menjadi 87. Penurunan yang sama juga terjadi pada makanan, minuman dan bahan baku lainnya.

<sup>4</sup> Bustanul Arifin, 2004. Menterjemahkan Keberpihakan Terhadap Sektor Pertanian: Suatu Telaah Ekonomi Politik. Dalam: Rudi Wibowo dkk (Ed)., Rekonstruksi dan Restrukturisasi Pertanian. PERHEPI, Jakarta 2004.

kesalah-pengertian dan pemahaman bagi sementara pihak, sehingga implementasinya pun menjadi jauh dari hakikat tujuan pengembangan agribisnis itu sendiri. Sebagai *buzz-word*, agribisnis memang telah sangat populer. Terminologinya telah ‘membudaya’ sejak pucuk pimpinan negara, berbagai pertemuan ilmiah dan seminar, dokumen-dokumen pemerintahan hingga ke tingkat penyuluh dan bahkan masyarakat umum. Akan tetapi, implementasi konsepsi agribisnis tersebut ternyata tidak sejalan dengan popularitas istilahnya.

Sebagai suatu paradigma berfikir baru, agribisnis pada dasarnya menekankan pada cara pandang yang melepaskan diri dari sebuah “tradisi” konvensional yang selama ini dianut, ketika membicarakan pertanian. Pertanian tidak hanya dipandang sebagai suatu sistem kegiatan *on-farm* semata-mata, akan tetapi mencakup berbagai subsistem dalam keseluruhan sistem, yang disebut agribisnis<sup>5</sup>. Bagi Indonesia khususnya, agribisnis bukanlah sekedar bertujuan untuk membuat kegiatan pertanian menjadi berdaya saing saja (sehingga mampu berkompetisi dalam arena global), akan tetapi lebih penting dari itu harus mampu membuat petani lebih produktif dan sejahtera. Namun demikian, pada tataran konseptual saja, saat ini kita masih banyak menghadapi atau menjumpai kesalah-pengertian tentang apa yang dimaksud dengan agribisnis tersebut. Beberapa kesalah-pengertian tersebut antara lain:

- Agribisnis diartikan sebagai suatu kegiatan pertanian komersial, atau petani yang berbisnis atau sekedar berorientasi pasar. Pengertian tersebut menghilangkan makna “sistem” dan keterkaitan antar subsistem, yang menjadi “sukma” bagi wawasan agribisnis itu sendiri;
- Agribisnis hanya diartikan sebagai perusahaan-perusahaan besar di bidang pertanian, sehingga memperkecil pengertian dan lingkup kesistemannya;
- Agribisnis hanya dipandang sebagai suatu “program” bagi kementerian pertanian, sehingga menghilangkan esensinya sebagai *a new paradigm*.
- Agribisnis diartikan sebagai sektor yang berkonotasi sempit, dan lainnya<sup>6</sup>.

Kesalah-pengertian makna tersebut tampaknya telah menjadi salah satu sebab “bias”nya sementara pihak dalam mendalami dan mencermati secara benar problema pertanian. Masalah pertama, utama dan mendasar yang dihadapi bangsa dalam pertanian

---

<sup>5</sup> Para ahli ekonomi pertanian umumnya “menyepakati” bahwa suatu sistem agribisnis yang lengkap terdiri atas: (1) Sub-sistem agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*) yakni kegiatan industri dan perdagangan yang menghasilkan sarana produksi usahatani seperti pembibitan, agro-kimia, agro-otomotif, *agri-equipment*; (2) Sub-sistem usahatani (*on-farm agribusiness*), yakni kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi usahatani untuk menghasilkan produk pertanian primer (*farm product*); (3) Sub-sistem agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*) yakni kegiatan industri yang mengolah produk pertanian primer menjadi produk olahan (*intermediate, finished product*) beserta perdagangannya (*wholesaler, retailer*) dan konsumennya; dan (4) Sub-sistem jasa penunjang (*agro-institution and agro-service*) yakni kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribisnis seperti perbankan, infrastruktur (fisik, normatif), Litbang, pendidikan & penyuluhan/konsultasi, transportasi, dan lain-lain.

<sup>6</sup> Beberapa statemen menunjukkan hal ini. Periksa Bayu Krisnamurthi, 2003: **Analisis Grand Strategy Pembangunan Pertanian: Pembangunan Sistem dan Usaha Agribisnis dan Implementasi Pembangunan Pertanian**. Juga Agus Pakpahan, *op cit*. Rudi Wibowo, *op cit*. Beberapa statemen, dalam bahasa yang kurang lebih sama, juga telah mengkritisi hal ini.

adalah semakin buram dan memprihatinkannya potret kehidupan para petani. Struktur petani dan pelaku pertanian secara nasional sangat beragam, demikian pula dengan bidang kegiatannya. Bagian terbesar petani di Indonesia pada dasarnya dapat dikategorikan dalam karakteristik petani “gurem” baik buruh tani maupun yang subsisten tradisional (*peasant*) dan masih semi komersial (*pseudo-farmer*), selain sebagian kecil lain merupakan petani berkarakteristik komersial dan perusahaan pertanian atau perusahaan agribisnis baik dalam level nasional maupun *multi-national corporation*.

Sekitar sepuluh tahun lalu, Badan Pusat Statistik mencatat ada sekitar 34.65 juta usaha mikro (98.1 persen dari total), usaha kecil (1.3 persen) menengah dan besar (0.6 persen), dengan total tenaga kerja mencapai 67 juta orang. Pada tahun 2001, sebesar 57 persen aset dikuasai usaha besar, dan hanya 21 persen saja yang dikuasai usaha kecil, yang justru mampu menyediakan lapangan kerja sekitar 89 persen, dan menyumbang sekitar 41 persen GDP. Bila dilihat dari bidang pembangunannya, usaha mikro dan kecil di bidang pertanian mempunyai kontribusi terbesar, yaitu 57 persen, industri 7 persen, serta perdagangan dan jasa sebesar 36 persen<sup>7</sup>. Saat ini, secara garis besar struktur tersebut tidak banyak berubah. Gambaran tersebut menjelaskan bahwa pola agribisnis kita masih sangat didominasi dan ditopang dari usaha pertanian rakyat yang berskala kecil (“gurem”), dengan tenaga kerja yang relatif “kurang trampil” dan tersebar di berbagai wilayah tanpa ikatan skala. Sebagaimana telah diungkapkan, kegiatan usaha tersebut seringkali masih belum sepenuhnya berorientasi pasar-komersial dan bahkan sebagian masih cenderung subsisten-tradisional, tentu dengan keragaman penggunaan teknologi yang sangat tinggi.

*Dualistic problem* dalam kegiatan pertanian sebagaimana dipreposisi Boeke tetap menjadi masalah penting bagi pembangunan pertanian. Oleh karena itu, ada kebutuhan yang sangat kritis untuk meluruskan atau menjernihkan kesalah-pengertian tersebut, jika tidak ingin dijumpai potret masa depan petani dan pertanian yang semakin memprihatinkan pada bangsa ini ke depan. Bagian terbesar pelaku pertanian membutuhkan hakekat kebijakan yang sangat berbeda dibandingkan dengan sebagian kecil lainnya, yang justru “menguasai” berbagai sumberdaya produktif yang dibutuhkan bagi suatu pembangunan pertanian yang berdaya saing seperti lahan, modal, teknologi dan informasi serta manajemen. Tanpa menyentuh aspek utama tersebut, pembangunan pertanian kita diyakini tidak akan mampu mengatasi masalah dasar dan struktural dalam pertanian. Misi inilah sebenarnya yang menjadi landasan dari agribisnis sebagai suatu paradigma baru dalam pembangunan pertanian kita.

---

<sup>7</sup> Rudi Wibowo, 2004. **Idealisasi Versus Fakta terciptanya Hubungan yang Saling Menguntungkan diantara Dunia Perbankan dan Agribisnis**. Makalah Seminar Optimalisasi Kemitraan Agribisnis dan Perbankan. Jakarta, 26 April 2004. Periksa juga Noer Soetrisno, 2003. **Menuju Pembangunan Ekonomi Berkeadilan Sosial**. STEKPI, Jakarta.

Jika disepakati bahwa agribisnis adalah cara pandang baru (*a new paradigm*) bagi bangsa ini dalam membangun dan mengembangkan pertanian sesuai dengan hakekat tujuan dasarnya (baca: meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani) dengan memperhatikan potret petani dan pertanian di Indonesia yang sangat dualistik saat ini, maka hal pertama dan utama yang secara teoritis dibutuhkan adalah upaya kelembagaan (*institutional building*) yang akan memampukan dan memberikan landasan kondusif (*enabling*) bagi berkembangnya kehidupan petani dan pertanian masa depan. Upaya kelembagaan tersebut harus dipandang sebagai suatu prasyarat keharusan (*necessary condition*) bagi suatu rekonstruksi dan restrukturisasi ekonomi (pertanian) secara menyeluruh.

Berkembangnya prasyarat keharusan tersebut pada dasarnya merupakan tugas utama pemerintah dalam mewujudkan keberpihakannya melindungi” dan “memberdayakan” petani dan pertanian. Tanpa prasyarat keharusan tersebut, diyakini “*Agribisnis hanyalah sosok dendang yang populer, akan tetapi disenandungkan di atas rintihan ketidak-berdayaan para petani*”. Segala bentuk upaya manajemen untuk membangun kehidupan petani dan pertanian yang dilaksanakan tanpa menyentuh atau mengkonstruksi ulang kelembagaan pertanian yang ada, diyakini tidak substansial sehingga tidak akan mampu mengatasi hakekat problema yang sedang dihadapi pertanian dan bangsa ini. Sayangnya, upaya-upaya kelembagaan yang dilakukan selama ini kurang tercermin sebagai penggerak utama dalam proses pembangunan pertanian, sehingga posisi ekonomi petani tetap menempati stratum terbawah dalam konstelasi struktur ekonomi Indonesia saat ini, dan bahkan sedang mengalami involusi yang mengkhawatirkan. Dibutuhkan kehadiran suatu kebijakan sosial ekonomi yang mendasar dan komprehensif dalam pembangunan agribisnis, sebagai bagian dari proses pemberdayaan ekonomi petani.

Upaya kelembagaan sebagai prasyarat keharusan dalam membangun pertanian (agribisnis) berdaya saing dan berkeadilan diharapkan dapat menjadi “kunci pembuka”. Akan tetapi, “kunci pembuka” inipun diyakini tidak akan cukup tanpa adanya upaya-upaya manajemen dalam mengembangkan agribisnis sesuai lingkungan internal maupun eksternalnya. Harus ada semacam prasyarat kecukupan (*sufficient condition*) berupa upaya manajemen (*management building*). Dinamika dan keragaman yang tinggi dalam karakteristik lingkungan produksi agribisnis tentu memerlukan antisipasi yang tinggi pula dalam mengeliminasi dampak-dampak yang tidak dikehendaki. Hal yang sama terjadi dalam aspek sosial budaya yang juga terus mengalami perubahan, terutama dalam kaitannya dengan perilaku konsumsi (misalnya dari rumah tangga ke *food service industry*, berkembangnya *grazing food* dan *street food* serta pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan dan kebugaran yang sedang dan akan merubah cara-cara konsumen dalam mengevaluasi suatu produk).

Jelas karakteristik dan kecenderungan perkembangan karakteristik agribisnis mempunyai implikasi penting dalam manajemen agribisnis. Oleh karena itu, meningkatkan kontribusi agribisnis dalam suatu konstruksi perekonomian secara keseluruhan adalah sama dengan membangun manajemen agribisnis dengan memperhatikan karakteristik agribisnis pada berbagai kondisi yang bersangkutan. Salah satu contoh adalah, karakteristik proses

produksi dan produk agribisnis yang berbasis pada proses biologis mengisyaratkan bahwa perusahaan agribisnis haruslah terintegrasi secara vertikal. Hal ini memberi arti bahwa subsistem agribisnis hulu, budidaya dan subsistem hilirnya diharapkan berada pada satu sistem manajemen yang integratif secara vertikal. Tuntutan integrasi vertikal ini pada dasarnya dilandasi oleh argumen teknis maupun argumen finansial/ekonomi.

Berdasarkan argumen teknis, antara kaitan sektor hulu-hilir memiliki ketergantungan teknis yang sangat tinggi sesuai karakteristik produk biologis. Untuk menghasilkan produk bawang merah dengan residu pestisida rendah misalnya, tidak mungkin dicapai bila hanya mengandalkan kegiatan produksi pada sektor hilir saja, tapi harus didukung oleh teknologi budidaya dengan penggunaan pestisida seminimum mungkin (pada sektor budidaya). Teknologi budidaya seperti itu hanya mungkin dilakukan bila bibit bawang merah yang dihasilkan pada sektor hulu adalah bibit yang tahan penyakit dan produktivitas hasilnya tinggi (misalnya teknologi bibit *transgenic*). Contoh ini menunjukkan perlunya konsistensi produk (jumlah, jenis, mutu, kontinuitas) yang hanya mungkin dicapai bila sektor hulu, budidaya dan hilir dalam agribisnis dikelola dalam suatu manajemen yang integratif.

Dari segi ekonomi, tuntutan pengelolaan/pengusahaan integrasi vertikal agribisnis pada dasarnya untuk menghilangkan (meminimumkan) ketimpangan margin pada berbagai sektor hulu, budidaya dan hilirnya. Keadaan buruk inilah yang seringkali terjadi pada kegiatan agribisnis saat ini. Agribisnis yang dikelola tidak secara integratif (tersekat-sekat, sendiri-sendiri) memberi dampak masalah ketimpangan margin, dan biasanya sektor budidaya menjadi korban karena struktur ekonomi yang dualistik. Informasi pasar (sebagai akibat perubahan selera, konsumen, harga) tidak ditransmisikan secara “adil” kepada sektor hilir, budidaya dan hulunya, bahkan cenderung ditahan untuk memperkuat posisi monopsonistis pada sektor hulunya. Selain itu, manajemen agribisnis yang tidak integratif akan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi pada sektor agribisnis, lebih-lebih dalam struktur ekonomi yang dualistik (sektor budidaya dengan petani dan UMKM, sektor hulu dan hilir dengan industri besar).

Manajemen agribisnis integrasi vertikal juga memungkinkan agribisnis untuk meningkatkan penetrasi pasar (*market penetration*), mengembangkan pasar (*market development*) maupun pengembangan produk (*product development*) melalui strategi-strategi pemasaran 4P (*price, product, place, promotion*). Karakteristik konsumen produk agribisnis yang sangat dipengaruhi oleh aspek sosial budaya dan segala keragamannya, memerlukan differensiasi 4P untuk peningkatan pangsa pasar. Dengan perkataan lain, dengan manajemen integrasi vertikal memungkinkan perusahaan agribisnis untuk lentur dalam volume, mutu produk, *delivery*, dan lain-lain untuk menjawab perubahan lingkungan bisnis yang dihadapi. Inilah tantangan manajemen sekaligus “tekanan” bagi petani dan pertanian kita menyongsong masa depannya.



## ***INSTITUTIONAL BUILDING: UPAYA MEMBERDAYAKAN PETANI***

Upaya mewujudkan pembangunan pertanian (agribisnis) masa mendatang adalah sejauh mungkin mengatasi masalah dan kendala kritikal yang sampai sejauh ini belum mampu diselesaikan secara tuntas sehingga memerlukan perhatian yang lebih serius. Satu hal yang sangat kritis adalah bahwa meningkatnya produksi pertanian (agribisnis) selama ini belum disertai dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani secara signifikan. Petani sebagai unit agribisnis terkecil belum mampu meraih nilai tambah yang rasional sesuai skala usaha tani terpadu (*integrated farming system*). Oleh karena itu persoalan membangun kelembagaan (*institution*) di bidang pertanian dalam pengertian yang luas menjadi semakin penting, agar petani mampu melaksanakan kegiatan yang tidak hanya menyangkut *on farm bussiness* saja, akan tetapi juga terkait erat dengan aspek-aspek *off farm agribussinessnya*.

Jika ditelaah, walaupun telah melampaui masa-masa kritis krisis ekonomi nasional, saat ini sedikitnya kita masih melihat beberapa kondisi yang dihadapi petani di dalam mengembangkan kegiatan usaha produktifnya, yaitu:

- Akses yang semakin kurang baik terhadap sumberdaya (*access to resources*), seperti keterbatasan aset lahan, infrastruktur serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan produktif lainnya;
- Produktivitas tenaga kerja yang relatif rendah (*productive and remunerative employment*), sebagai akibat keterbatasan investasi, teknologi, keterampilan dan pengelolaan sumberdaya yang efisien;
- Perasaan ketidakmerataan dan ketidakadilan akses pelayanan (*access to services*) sebagai akibat kurang terperhatikannya rangsangan bagi tumbuhnya lembaga-lembaga sosial (*social capital*) dari bawah;
- Kurangnya rasa percaya diri (*self reliances*), akibat kondisi yang dihadapi dalam menciptakan rasa akan keamanan pangan, pasar, harga dan lingkungan.

Secara klasik sering diungkapkan bahwa penyebab utama ketimpangan pendapatan dalam pertanian adalah ketimpangan pemilikan tanah. Hal ini adalah benar, karena tanah tidak hanya dihubungkan dengan produksi, tetapi juga mempunyai hubungan yang erat dengan kelembagaan, seperti bentuk dan birokrasi dan sumber-sumber bantuan teknis, juga pemilikan tanah mempunyai hubungan dengan kekuasaan baik di tingkat lokal maupun di tingkat yang lebih tinggi. Manfaat dari program-program pembangunan pertanian di perdesaan yang datang dari “atas” tampaknya hanya jatuh pada kelompok pemilik tanah, sebagai lapisan atas dari masyarakat desa. Sebagai contoh, program kredit dengan jaminan tanah serta bunga modal, subsidi paket teknologi produksi, bahkan kontrol terhadap distribusi pengairan dan pasar lokal juga dilakukan oleh kelompok ini. Di lain pihak, pelaksanaan perubahan seperti *landreform*, *credit reform* dan sebagainya yang memang secara substansial diperlukan sebagai suatu cara redistribusi asset masih merupakan isu yang kurang populer. Berbagai langkah terobosan sebagai suatu upaya kelembagaan guna memecahkan permasalahan di atas yang dikembangkan seperti pengembangan sistem

usahatani sehamparan, pola PIR dan sebagainya, sama sekali belum memecahkan problem substansial yang oleh Boeke diungkapkan sebagai "dualisme".

Dalam pada itu, karakteristik perdesaan seringkali ditandai dengan pengangguran, produktifitas dan pendapatan rendah, kurangnya fasilitas dan kemiskinan. Masalah-masalah pengangguran, setengah pengangguran dan pengangguran terselubung menjadi gambaran umum dari perekonomian saat ini. Pada waktu yang sama, terjadi pula produktifitas yang rendah dan kurangnya fasilitas pelayanan penunjang. Rendahnya produktifitas merupakan ciri khas di kawasan perdesaan. Pada umumnya, sebagian besar petani dan para pengelola industri perdesaan, bekerja dengan teknologi yang tidak berubah. Investasi modal pada masa sebelum krisis lebih banyak diarahkan pada industri perkotaan daripada di sektor pertanian perdesaan. Sebagai konsekuensinya, perbedaan produktifitas antara petani perdesaan dengan pekerja industri perkotaan semakin besar senjangnya. Hal ini merupakan masalah yang banyak dibicarakan dalam menyoroti ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan, pertanian dan bukan pertanian.

Pelayanan publik bagi adaptasi teknologi dan informasi terutama untuk petani pada kenyataannya sering menunjukkan suasana yang mencemaskan. Di satu pihak memang terdapat kenaikan produksi, tetapi di lain pihak tidak dapat dihindarkan terjadinya pencemaran lingkungan, terlemparnya tenaga kerja ke luar sektor pertanian yang tidak tertampung dan tanpa keahlian/ketrampilan lain, ledakan hama karena terganggunya keseimbangan lingkungan dan sebagainya. Manfaat teknologipun seringkali masih dirasakan lebih banyak dinikmati pemilik aset sumberdaya (tanah) sehingga pada gilirannya justru menjadi penyebab utama dalam mempertajam perbedaan pendapatan dan mempercepat polarisasi dalam berbagai bentuk. Perasaan ketidak-amanan dan kekurang-adilan akibat berbagai kebijakan dan kebocoran (misalnya kasus impor *illegal*, *dumping*, pemalsuan dan ketiadaan saprotan, keracunan lingkungan, jatuhnya harga saat panen dan lainnya) seringkali menjadi pelengkap rasa tidak percaya diri (dan apatisme berlebihan) pada sebagian petani.

Tinjauan holistik dengan memperhatikan kondisi berbagai aspek kehidupan pertanian dan perdesaan seperti diuraikan disini, menunjukkan bahwa inti esensi dari proses pembangunan pertanian dan perdesaan adalah transformasi struktural masyarakat perdesaan dari kondisi perdesaan agraris tradisional menjadi perdesaan berbasis ekologi pertanian dengan perusahaan bersistem agribisnis, yang menjadi inti dari struktur ekonomi perdesaan yang terkait erat dengan sistem industri, sistem perdagangan dan sistem jasa nasional dan global.

Mencermati situasi di atas, jelas sangat diperlukan upaya-upaya pengembangan agribisnis yang lekat dengan peningkatan pemberdayaan (*empowering*) masyarakat agribisnis terutama skala mikro dan kecil dalam suatu kebijakan yang "berpihak". Keberpihakan kebijakan semacam itu sangat (baca: mutlak) diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala dan tantangan pengembangan agribisnis yang berorientasi ekonomi kerakyatan, keadilan, dan sekaligus meningkatkan daya saing dalam iklim "kebersamaan" pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Untuk itu, sebagai prasyarat keharusan diperlukan suatu



iklim kebijakan yang mendorong terbangunnya institusi (kelembagaan) yang mampu meningkatkan posisi petani menjadi bagian dari suatu kebersamaan entitas bisnis, baik dalam bentuk kelompok usaha bersama, koperasi, korporasi (*community corporate*) ataupun *shareholder*. Upaya kelembagaan tersebut diyakini akan dapat menjadi nilai (*value*) baru, semangat baru bagi petani untuk terutama dapat melonggarkan keterbatasan-keterbatasannya, seperti akses terhadap sumberdaya produktif (terutama lahan), peningkatan produktivitas kerja, akses terhadap pelayanan dan rasa keadilan, serta meningkatkan rasa percaya diri akan lingkungan yang aman, adil dan transparan.

Manifestasi dan implementasi dari upaya kelembagaan tersebut pada dasarnya bukanlah mudah dan sederhana. Sebagai suatu *rules* atau nilai dan semangat baru dalam pembangunan pertanian ke depan, seyogyanya mengandung berbagai ciri pokok dan mendasar. Pertama, upaya kelembagaan tersebut diharapkan menjadi pendorong terciptanya *the same level playing field* bagi petani dan pelaku ekonomi lainnya, berdasarkan “aturan main” yang *fair, transparent*, demokratis dan adil. Kedua, upaya kelembagaan tersebut mampu mendorong peningkatan basis sumberdaya, produktivitas, efisiensi dan kelestarian bagi kegiatan-kegiatan produktif pertanian, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

## KOPERASI DAN KORPORASI AGRIBISNIS

*Institutional building* sebagai prasyarat keharusan dalam pengembangan agribisnis yang bagian terbesar pelakunya petani “kecil dan gurem” adalah bangun koperasi dan korporasi agribisnis. Secara substansial, upaya kelembagaan tersebut pada dasarnya dapat dipandang sebagai langkah menuju rekonstruksi ulang dalam penguasaan dan akses sumberdaya produktif di bidang pertanian, terutama berkaitan dengan pengembangan agribisnis. Koperasi lebih merupakan *soft-step reconstruction*, sementara korporasi lebih merupakan rekonstruksi yang lebih “radikal”, atau *hard-step reconstruction*.

Bangun kelembagaan koperasi dipandang salah satu sosok yang tepat, mengingat entitas tersebut berciri sebagai asosiasi (perkumpulan orang/petani), badan usaha dan juga sebagai suatu gerakan (untuk melawan penindasan ekonomi dan ketidakadilan sistem pasar). Sejarah koperasi di Indonesia memang penuh dengan romantika sebagai akibat “terlampau kuatnya” dukungan pemerintah dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga dalam banyak hal menjadikan sosok koperasi di Indonesia sempat “kehilangan” jati dirinya. Di kalangan masyarakat sendiri, masih beragam pendapat tentang eksistensi koperasi dalam sistem ekonomi Indonesia saat ini. Sebagian *apatis*, sehingga memerlukan pengkajian ulang mengenai eksistensi koperasi dalam sistem ekonomi Indonesia. Sebagian lain memandang koperasi sebagai *entitas* yang perlu dikembangkan, walaupun seadanya saja. Sementara itu, berbagai pendapat lain merasa penting untuk mengembangkan koperasi sebagai sosok kelembagaan ekonomi yang kokoh bagi pemberdayaan masyarakat<sup>8</sup>. Pendapat terakhir ini

---

<sup>8</sup> Arief, Sritua., 1997. **Pembangunan dan Ekonomi Indonesia: Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi**. CPSM, Bandung.

meyakini bahwa koperasi sebagai upaya kelembagaan dapat merupakan instrumen bagi upaya restrukturisasi ekonomi pertanian, untuk mewujudkan keseimbangan dalam penguasaan sumber-sumber ekonomi pertanian. Ada dua argumen yang melandasi pendapat ini, yaitu (a) secara kolektif, koperasi dapat menghimpun para pelaku ekonomi pertanian dalam menjual produk-produk yang dihasilkannya dengan posisi tawar yang baik, dan (b) koperasi secara organisasi dapat menjadi wadah yang bertanggungjawab bagi kebutuhan pengadaan saprotan maupun kebutuhan lain secara bertanggungjawab pula.

Walaupun demikian, ke depan, usaha-usaha untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bagi pengembangan agribisnis di perdesaan tahap awal tetap masih membutuhkan “ulur tangan” (kebijakan pemihakan) pemerintah secara langsung, akan tetapi dengan pengertian bentuk “ulur tangan” pemerintah tersebut harus ditempatkan dalam upaya pengembangan iklim berusaha yang sesuai. Misalnya, pengembangan program dan metoda penyuluhan pertanian yang diarahkan kepada upaya pengembangan orientasi dan kemampuan kewirausahaan, yang lebih mencakup substansi manajemen usaha dan penyesuaian terhadap materi-materi di bidang produksi dan pemasaran. Dalam hubungan ini maka pola magang dan sistem pencangkakan manajer dapat menjadi alternatif yang dipertimbangkan.

Masalah kelangkaan kapital yang seringkali menjadi kendala pengembangan agribisnis memerlukan kebijakan secara lebih hati-hati. Pemberian kredit yang murah seringkali justru dapat berakibat buruk bagi perkembangan kegiatan usaha dalam jangka panjang, jika tidak diikuti dengan upaya-upaya pengendalian yang baik. Alternatif yang dinilai lebih sesuai adalah dengan mengembangkan koperasi agribisnis yang menyediakan fasilitas kredit yang mudah, yaitu kredit yang memiliki kemudahan dalam perolehannya, kesesuaian dalam jumlah, waktu serta metode peminjaman dan pengembaliannya. Disamping itu pemberian kredit tersebut perlu di atur sedemikian sehingga kemungkinan re-investasi dan keberhasilan usaha dapat lebih terjamin. Dalam hal ini bentuk *supervised credit* dapat menjadi alternatif model pemberian kredit. Banyak contoh sukses koperasi kredit di bidang agribisnis yang kuat dan besar, seperti *Credit Agricole* di Perancis, Rabobank di Belanda, dan lain-lain.

Pengembangan agribisnis dengan agro-industri perdesaan juga perlu didukung oleh kelembagaan yang sesuai, mengingat kerakteristiknya yang sangat beragam. Dalam kelembagaan usaha tersebut misalnya, perlu dikaji kombinasi optimal dari penguasaan dan pemanfaatan skala usaha dengan efisiensi unit usaha, sesuai dengan sifat kegiatan yang dilakukan. Salah satu contoh, jika kegiatan agroindustri memang akan lebih efisien apabila dilakukan dalam skala yang relatif kecil, maka pengembangan kegiatan usaha individual perlu didorong. Akan tetapi untuk kegiatan pengangkutan yang memerlukan skala kegiatan yang lebih besar, perlu dipertimbangkan suatu unit kegiatan yang sesuai pula. Dengan demikian, dimungkinkan terjadinya kondisi dimana kegiatan agroindustri dilakukan secara individual (tidak harus dipaksakan berada dalam unit kegiatan koperasi misalnya), tetapi para agroindustriawan tersebut bersama-sama membentuk koperasi, atau unit usaha koperasi dalam bidang pengangkutan. Hal-hal semacam memerlukan penelaahan lebih lanjut secara

mendalam, dikaitkan dengan sosok spesifik unit usaha yang dikembangkan dalam koperasi agribisnis tersebut.

Oleh karena itu, dalam operasionalisasi pengembangan agribisnis/agroindustri di tingkat lokalita (kawasan perdesaan) akan dijumpai pula kondisi yang sangat beragam baik dari segi agroekosistem, sarana dan prasarana maupun kondisi sosial budayanya. Keragaman-keragaman tersebut jelas menghendaki rancang bangun kelembagaan yang mampu mengoptimalisasikan kinerja manajemen maupun teknologi. Dalam hal ini, beberapa contoh berkembangnya model-model kelembagaan agribisnis seperti SPAKU, KUBA, Desa Cerdas Teknologi, ULP2, Gerakan Kemitraan, Inkubator, Klinik Tani/Agribisnis, Asosiasi-asosiasi Petani, pemanfaatan tenaga-tenaga perekayasa profesional yang berfungsi sebagai konsultan dan nara sumber, harus dipandang sebagai langkah esensial untuk mengakumulasikan modal sosial (*social capital*) yang harus terus-menerus didorong sebagai embrio dalam mewujudkan *institutional building* yang akan memperkokoh posisi tawar petani dalam agribisnis.

Dalam pada itu, korporasi petani dalam bidang agribisnis telah menjadi wacana dan diskusi publik sebagai suatu *institutional building*. Pesan yang lebih menonjol adalah pada lingkungan petani perkebunan (khususnya tebu-gula di BUMN perkebunan) di Jawa Timur. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: *Apakah pola BUMN perkebunan seyogyanya diprivatisasi menjadi swasta murni seperti kecenderungan yang ada, ataukah mengembangkan alternatif berupa korporasi masyarakat (petani) sebagai pemilik utama perkebunan tersebut?* Banyak argumen yang membimbing kecenderungan rekonstruksi agribisnis tebu-gula tersebut, antara lain (a) besarnya biaya produksi kebun tebu, 60-70 persen, (b) mudahnya persenyawaan kepentingan antara subyek petani/rakyat, pemerintah/*principal* dan manajemen BUMN, (c) lemahnya reinvestasi baru yang dilakukan BUMN, (d) institusi korporasi dianggap paling tepat dalam penyelesaian *asymmetric power* yang selama ini terjadi, (e) *the best product* hanya akan dihasilkan oleh *the best community*, (f) rigiditas pabrik dan fleksibilitas pilihan pemanfaatan lahan petani<sup>9</sup>.

Korporasi masyarakat (petani agribisnis) pada dasarnya adalah perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat (petani agribisnis). Korporasi masyarakat pada dasarnya akan menjadi kuat manakala memanfaatkan segenap *social capital* yang ada pada masyarakat tersebut. Contoh yang dikemukakan adalah pelajaran dari pengalaman empirik perusahaan American Crystal Sugar Company (ACSC) yang dibeli oleh 1300 petani pada tahun 1973 melalui NYSE senilai US\$ 86 juta. Sejak saat itu, ACSC berkembang pesat, baik dalam areal, produksi, rendemen, kepemilikan petani, dan *joint ventures*<sup>10</sup>. Demikian pula, pelajaran yang dikembangkan di Malaysia dalam merestrukturisasi kepemilikan saham melalui skema Amanah Saham Nasional tampaknya dapat menjadi bahan pengkajian<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> Agus Pakpahan, 2004. *Op cit.* halaman 115

<sup>10</sup> Agus Pakpahan, 2004. *Op cit.* halaman 116.

<sup>11</sup> Arief, Sritua, 1997. *Op cit.* Halaman 208.

Mengembangkan kelembagaan-kelembagaan di atas sebagai landasan gerak pengembangan agribisnis bagi para petani di perdesaan bukanlah merupakan hal yang mudah dan sederhana. Dibutuhkan dukungan kebijakan pemihakan yang lebih kuat, tidak cenderung berorientasi kepada yang kuat, tetapi lebih kepada yang lemah dan yang kurang berdaya (*the under privileged*). Kebijakan yang bersifat “netral” saja tidak cukup dalam pembangunan pertanian dan agribisnis, karena dibutuhkan pemahaman dan kepedulian akan masalah yang dihadapi oleh rakyat (petani) yang merupakan bagian terbesar di lapisan bawah. Untuk itu, pemerintahan memang harus mampu mengatasi hambatan psikologis, karena seringkali birokrasi strata atas di banyak negara berkembang seperti Indonesia umumnya merupakan kelompok elit suatu bangsa, yang tidak selalu tanggap dan mudah menyesuaikan diri atau mengasosiasikan diri dengan rakyat yang miskin dan terbelakang.

## PENUTUP

Tulisan sederhana ini berusaha memperoleh “kejernihan” pemahaman pembangunan pertanian berwawasan agribisnis di Indonesia. Pelaku ekonomi pertanian sekaligus investor utamanya adalah berjuta petani sebagai “pengusaha” agribisnis berskala mikro dan kecil yang merupakan basis ekonomi kerakyatan, penopang ekonomi perdesaan dan sumber penghasilan bagi sebagian besar masyarakat perdesaan. Sosok pertanian tersebut, --walaupun sangat potensial--, akan tetapi dihadapkan pada berbagai “tekanan” baik secara internal-domestik maupun eksternal-globalisasi. Kedua realitas “tekanan” tersebut secara konsisten telah, sedang, dan akan terus meningkatkan “kegelisahan dan keprihatinan” petani dan pertanian kita. Manakala tanpa upaya-upaya mendasar, pertanian dan agribisnis hanyalah akan menjadi “mimpi buruk” bagi bangsa ini.

Salah satu upaya mendasar untuk menghindari “mimpi buruk” pembangunan pertanian dan agribisnis yang dikemukakan adalah mengembangkan upaya kelembagaan (*institutional building*). Institusi atau kelembagaan adalah suatu *rules* yang merupakan produk dari nilai, yang diharapkan terus berevolusi dan menjadi bagian dari budaya (*culture*). Hal itu merupakan prasyarat keharusan (*necessary condition*) untuk menjadi “kunci pembuka” pengembangan agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan dan berkeadilan. Secara operasional, sosok koperasi agribisnis dan korporasi (masyarakat) agribisnis dipandang sebagai bangun kelembagaan yang mampu berperan dalam mewujudkan pembangunan pertanian sebagaimana yang di-visi-kan.

Mewujudkan upaya di atas tidaklah mudah dan sederhana. Karakteristik, keunikan dan keragaman yang tinggi pada berbagai kegiatan agribisnis di satu pihak, serta dinamika permintaan dan konsumsi yang sangat tinggi memerlukan manajemen pengelolaan yang terintegrasi sebagai suatu syarat kecukupan (*sufficient condition*).

Diyakini, kunci utama untuk dapat memanfaatkan segenap *social capital* yang ada pada masyarakat adalah terletak pada kualitas sumberdaya manusia. Dalam hal ini yang terpenting adalah bagaimana membangun SDM yang ada (dengan latar belakang dan

kualitas yang berbeda-beda) menjadi suatu *team work* yang harmonis. Banyak persoalan inefisiensi kelembagaan yang disebabkan oleh ketidak-harmonisan SDM yang terlibat di dalamnya.

## Referensi Kepustakaan

- Anonim, 2002. **Pembangunan Sistem Agribisnis Sebagai Penggerak Ekonomi Nasional**, Departemen Pertanian, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2003. **Ekonomi Kerakyatan Dalam Kancah Globalisasi**. Kantor Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- Arief, Sritua., 1997. **Pembangunan dan Ekonomi Indonesia: Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi**. CPSM, Bandung.
- Arifin, B. 2004. **Menterjemahkan Keberpihakan Terhadap Sektor Pertanian: Suatu Telaah Ekonomi Politik**. Dalam: Rudi Wibowo dkk (Ed)., Rekonstruksi dan Restrukturisasi Pertanian. PERHEPI, Jakarta 2004.
- Baharsjah, S. 1996. **Kemitraan Dalam Pembangunan Nasional Memasuki Abad 21 : Peningkatan Ekonomi Pertanian**. Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Cendekiawan Indonesia Ke III. Jakarta, 27-28 Agustus 1996
- Chairil Anwar Rasahan dan Rudi Wibowo, 1996. **Pemantapan Kebijakan Pembangunan Pertanian Yang Mendukung Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Pertanian**. Kertas Makalah pada Konpernas Perhepi XII. Denpasar 7-9 Agustus 1996.
- Departemen Pertanian, 2002. **Penjabaran Program dan Kegiatan Pembangunan Pertanian 2001-2004**. Departemen Pertanian, Jakarta.
- Korten, David C., 1980, **Community Organization and Rural Development : A Learning Process Approach**, dalam Public Administration Review, No.40 tahun 1980
- Krisnamurthi, B., 2003. **Analisis Grand Strategy Pembangunan Pertanian: Pembangunan Sistem dan Usaha Agribisnis dan Implementasi Pembangunan Pertanian**. Makalah, disampaikan pada Lokakarya Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Pertanian. Jakarta, 10-11 Desember 2003.
- Menteri Pertanian RI., 2000. **Memposisikan Pertanian Sebagai Poros Penggerak Perekonomian Nasional**. Departemen Pertanian, Januari 2000.
- Pakpahan., 2004. **Petani Menggugat**. Max Havelaar Indonesia dan GAPPERINDO, Jakarta.
- Rudi Wibowo., 1999. **Refleksi Teori Ekonomi Klasik Dalam Manajemen Pemanfaatan Sumberdaya Pertanian Pada Milenium Ke Tiga**. Dalam Refleksi Pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_., 2001. **Mewujudkan Visi Agribisnis Berdaya Saing Melalui Pembangunan Wilayah Yang Selaras Dengan Alam**. Orasi Ilmiah Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Jember. Jember, 12 Nopember 2001.

- \_\_\_\_\_. 1999. **Etika Pembangunan Sumberdaya Pertanian Menuju Pembangunan Berkelanjutan.** Dalam Rudi Wibowo (ed). 1999. Refleksi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Nusantara. Penerbit Sinar Harapan, 1999.
- \_\_\_\_\_, 2000. **Perspektif Manajemen Pembangunan Pertanian Indonesia.** Jurnal Agribisnis Volume IV Nomor 1. Januari-Juni 2000. JUBC, Pusat Bisnis Universitas Jember.
- \_\_\_\_\_, Bayu Krisnamurthi dan Bustanul Arifin., (ed). 2004. **Rekonstruksi dan Restrukturisasi Pertanian.** Beberapa Pandangan Kritis Menyongsong Masa Depan. PERHEPI, Jakarta.
- Saragih, B. (2000). **Karakteristik Agribisnis dan Implikasinya Bagi Manajemen Agribisnis** (*Agribusiness Characteristics and its Implication to Agribusiness Management*). Jurnal Agribisnis Volume IV Nomor 1. Januari-Juni 2000. JUBC, Pusat Bisnis Universitas Jember.
- Soetrisno, N., 2003. **Menuju Pembangunan Ekonomi Berkeadilan Sosial.** STEKPI, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2003a. **Kewirausahaan Dalam Pengembangan UKM di Indonesia.** Dalam: **Ekonomi Kerakyatan Dalam Kancah Globalisasi.** Kantor Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- \_\_\_\_\_, 2001. **Rekonstruksi Pemahaman Koperasi. Merajut Kekuatan Ekonomi Rakyat.** INTRANS, Jakarta.